

OPINI

Jawa Pos • Senin 7 Juni 2010

Jepang di Tangan Kan

O l e h

A. SAFRIL MUBAH*

NAOTO Kan resmi terpilih sebagai perdana menteri baru Jepang menggantikan Yukio Hatoyama yang mengundurkan diri pada Rabu (2/6). Dalam voting di Majelis Rendah Diet (parlemen Jepang), Jumat (4/6), ketua Partai Demokrat Jepang (DPJ) itu memperoleh dukungan 313 suara di antara 477 anggota. Dia mengalahkan Ketua Partai Demokratik Liberal (LDP) Sadakazu Tanigaki yang mengantongi 116 suara (*Jawa Pos*, 5/6/2010).

Kan merupakan PM ke-94 Jepang dalam sejarah Negeri Matahari Terbit itu dan PM ke-5 dalam empat tahun terakhir. Politikus kawakan berusia 63 tahun tersebut merupakan sosok yang teguh mempertahankan prinsip dan tidak plinplan seperti Hatoyama. Dia dikenal sebagai birokrat ulung yang berpengalaman menduduki berbagai jabatan penting dalam pemerintahan.

Popularitas Kan meroket kala menjabat menteri kesehatan era 1990-an dan membongkar borok pemerintah yang membiarkan para penderita hemofilia menerima transfusi darah dari penderita HIV/AIDS. Karena sikap kritis dan keberaniannya itulah, lulusan Tokyo Institute of Technology tersebut dinilai publik Jepang sebagai sosok yang paling tepat untuk menduduki jabatan PM.

Harapan rakyat Jepang kian membunyah karena Kan tidak berasal dari dinasti politik seperti para mantan PM sebelumnya yang telah gagal. Itu membuktikan bahwa menteri keuangan pada era pemerintahan Hatoyama tersebut menapaki karir politik hingga puncak tidak disebabkan

darah biru yang mengalir dalam dirinya, tetapi karena memang kemampuannya yang lebih dari para politikus lain.

Tantangan

Mantan PM Hatoyama mewariskan beragam permasalahan rumit kepada Kan. Selain belum terealisasinya relokasi pangkalan militer Amerika Serikat di Okinawa yang memicu pengunduran diri Hatoyama, Jepang di tangan Kan menghadapi ancaman Tiongkok yang berpotensi menyalipl Negeri Sakura tersebut sebagai kekuatan ekonomi terbesar kedua di dunia. Meskipun pertumbuhan ekonomi Jepang pada triwulan I 2010 meningkat hingga 4,9 persen dibanding minus 15,9 persen pada periode yang sama tahun lalu, angka pengangguran terbuka juga tetap tinggi (3,23 juta orang) untuk ukuran negara maju seperti Jepang.

Wajar jika Kan memprioritaskan reformasi fiskal sebagai program utama pemerintahannya. Dia berencana meningkatkan pajak hingga 5 persen untuk menutupi defisit keuangan negara yang dililit utang 200 persen dari GDP. Jika upaya itu gagal, gelombang ancaman krisis utang Yunani berpotensi menyapu Jepang. Itulah tantangan terbesar Kan dan tentunya dia harus bekerja keras untuk mengatasinya.

Persoalannya, energi Kan mungkin terkuras untuk memperbaiki citra DPJ

yang hancur lebur di tangan Hatoyama. Kegagalan Hatoyama telah menurunkan dukungan publik terhadap partai penguasa itu. Meskipun kepemimpinan baru mampu mendongkrak dukungan publik, kenaikannya tidak terlalu signifikan. Hal itu terbaca dari jajak pendapat *Yomiuri Shimbun* yang menunjukkan peningkatan dukungan dari 9 persen menjadi 29 persen setelah Kan terpilih sebagai PM.

Persentase dukungan yang masih jauh di bawah angka mayoritas itu belum cukup untuk mengembalikan kepercayaan rakyat terhadap DPJ. Sebagai perbandingan, ketika partai yang didirikan Hatoyama pada 1998 tersebut mampu meruntuhkan dominasi kekuasaan 55 tahun LDP pada pemilu majelis rendah Agustus tahun lalu, suara yang diraih mencapai 74 persen. Sebenarnya, tingkat dukungan rakyat setinggi itu merupakan modal berharga bagi DPJ untuk menjalankan roda pemerintahan dengan lancar dan sukses.

Namun, politik uang yang dilakukan Hatoyama telah merusak segalanya. Alih-alih mampu menciptakan sebuah pemerintahan bersih dan berwibawa, DPJ justru menampilkan contoh jelek kepada rakyat yang telah muak dengan perilaku korup politisi. Karena itu, Kan harus melakukan investigasi mendalam atas skandal memalukan tersebut jika ingin nama baik partainya kembali meroket.

Sebagai pemimpin partai terbesar di Jepang, Kan tidak boleh ragu untuk memeriksa semua anggota partai yang terlibat, termasuk Hatoyama. Dia harus berani bersikap tegas dengan membe-

rikan sanksi kepada mereka yang bersalah. Tidak peduli orang itu dekat dengan dirinya atau tergolong tokoh partai yang disegani. Kalau perlu, jika memang terbukti bersalah, Kan harus siap merelakan anggota partainya diseret ke pengadilan.

Situasi itu sangat tidak menguntungkan bagi upaya DPJ untuk memenangi pemilu Majelis Tinggi pada 11 Juli mendatang. Pelaksanaan pemilu yang tinggal sebulan lagi memaksa Kan harus berpacu untuk melewati tantangan ke depan dengan mulus. Ibarat pacuan kuda, dia harus mampu memacu partainya untuk saling berkejaran melawan LDP sebagai partai oposisi dalam mengumpulkan dukungan publik. Sebulan ke depan, politik Jepang akan dipenuhi kompetisi adu cepat dua partai itu untuk saling unggul dalam berbagai jajak pendapat yang berpuncak pada pemilu nanti.

Kondisi Jepang masa kini yang dilanda aneka permasalahan kronis seperti pertumbuhan ekonomi stagnan, utang publik yang sangat besar, pengangguran yang merajalela, pemerintahan yang dikotori dengan uang, serta penduduk usia tua yang bertambah banyak sehingga mengurangi produktivitas kerja merupakan kartu truf LDP untuk mengalahkan DPJ. Jika Kan tidak mampu memenangi pacuan kuda itu, bayang-bayang pengalaman Hatoyama yang harus meletakkan jabatan di tengah jalan bakal menghantui pemerintahannya. (*)

*) A. Safril Mubah, dosen ilmu hubungan internasional FISIP Universitas Airlangga